

SAHdaR

Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat

Laporan Penelitian
**Survey Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pendidikan**
Di Kota Medan

Harry Surya Sirait, S.Pd

Alan Darmawan, S.Pd

Putri Puspita Sari

Miskar Siahaan

Dede Suhendro

Indri Prima Dewi

Petrus Saragi

Mahatir Asad

Tim Peneliti:

Koordinator penelitian:

Harry Surya Sirait, S.Pd

Peneliti lapangan

Alan Darmawan, S.Pd

Putri Puspita Sari

Miskar Siahaan

Dede Suhendro

Indri Prima Dewi

Petrus Saragi

Mahatir Asad

Penanggung Jawab

TR. Arif Faisal, SH

Editor

Fahriza Marta Tanjung, S.Pd

SAHdaR

2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kita panjatkan atas rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Kami mulai uraian ini dengan mengetengahkan apa makna pendidikan *atau "education"*. Asal-usul kata *"education" adalah "educio", yang mengandung makna: "to lead out; to take out with one to one's province; to bring out a ship from the haibour; to put to sea; to assist at birth; to nourish and support"* (Lewis & Short Latin Dictionary).

Penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan yang cukup berharga demi memajukan pendidikan kita. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-sebesaranya kami sampaikan kepada semua pihak baik swasta maupun negeri. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu Camat dan lurah yang menjadi daerah penelitian ini yang sudah membantu dalam berbagai hal dari awal hingga penelitian ini berakhir.

Ucapan terima kasih yang tak terhiga juga kami ucapakan kepada responden yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan data kepada peneliti. Kiranya apa yang telah kita perbuat akan dapat berguna untuk anak dan generasi bangsa yang akan datang.

Tim Peneliti

ABSTRAK

SURVEY TINGKAT PARTISIPASI ORANGTUA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN

Harry Surya Sirait, S.Pd. Alan Darmawan, S.Pd. Putri Puspita Sari. Miskar Siahaan

Survey ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dalam setiap daerah yang ada di Indonesia, maka secara otomatis dalam penyelenggaraan pendidikannya pun mengalami otonomi dalam hal penyelenggaraan atau pengelolaan. Dengan demikian sekolah yang ada didaerah bebas dalam penyelenggaran tersebut.baik dalam pengelolaan Sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal ini dapat memicu ketimpangan penyelenggaraan misalnya korupsi pendidikan dan penyalagunaan wewenang, dengan adanya prilaku seperti itu maka apa yang menjadi tergetan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan terbengkalai atau sulit untuk tercapai.

Penelitian survey ini menunjukkan bahwasanya partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangatlah rendah. Walaupun dalam penelitian ini belum dapat dikatakan penelitian populasi hanya sekedar penelitian keterwakilan strata sosial. Akan tetapi dapat terlihat jelas bahwasanya. Antara sekolah dan orangtua siswa kurang memiliki komonikasi yang baik dalam peneingkatan mutu pendidikan anak. Sekolah tidak peduli dengan kemajuan pendidikan secara umum dan sekolah tidak terbuka dalam setiap hal, baik progam maupun kebijakan. Hal inilah yang menjadikan dunia pendidikan kita rawan terkena penyakit korupsi.

Berkaitan dengan permasalahn diatas perlu kiranya untuk mendorong peningkatan partisipasi orangtua siswa dengan berbagai cara, diantaranya menerapkan program Anggaran Pendapatan dan belanja sekolah yang partisipatif. Dimana orangtua siswa atau masyarakat terlibat langsung dalam meikirkan dan menentukan program yang akan dilaksanakan setahun kedepan dan ikut memikirkan anggaran yang akan dikeluarkan maupun untuk menambah dana yang kurang. Dengan demikian masyarakat dan orangtua akan merasa memiliki sekolah dan akhirnya tanggungjawab untuk memningkatkan mutu pendidikan dipikul bersama-sama

Kata kunci: partisipasi , orangtua/masyarakat, sekolah

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak yang diatur dalam konstitusi.¹ Sebagai hak bagi rakyat, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Hak pendidikan menjadi penting pula karena merupakan sarana untuk mewujudkan hak-hak yang lain. Maka, terhambatnya pemenuhan hak pendidikan secara langsung berdampak terhadap pelanggaran/ pengurangan/ perlindungan hak yang lain.

Pada kenyataannya, upaya pemenuhan hak pendidikan berjalan mundur. Tidak terpenuhinya hak pendidikan secara merata ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti angka putus sekolah dan buruknya pelayanan pendidikan. Terbukti bahwa, jika pada 1996 hanya terdapat 1,7 juta siswa putus sekolah, pada 2009 lalu angkanya meningkat menjadi 11,7 juta siswa.² Tingginya angka putus sekolah ini banyak diakibatkan oleh biaya pendidikan yang tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh penduduk miskin, serta tingginya angka korupsi pada sektor pendidikan.

Korupsi pendidikan terjadi dari level yang paling tinggi (Kemendiknas) hingga pada level sekolah. Korupsi pendidikan terjadi dalam beberapa modus seperti pengadaan dan rehabilitasi gedung sekolah. ICW menyatakan bahwa korupsi pendidikan terjadi pada dana BOS dan DAK. Seperti hasil audit BPK tahun 2010, bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) sekolah menyimpangkan dana BOS sekitar Rp. 13,7 juta. Di lain pihak, penyerapan anggaran tahun 2010 oleh Kemdiknas hanya mencapai 89,29 persen dari total Rp. 63,87 triliun.

Korupsi pendidikan secara langsung berdampak pada tiga hal yang dapat dijadikan indikator pemenuhan hak pendidikan, antara lain angka putus sekolah, fasilitas sekolah, kualitas dan kesejahteraan guru. Dari riset dan pemantauan ICW pada korupsi pendidikan selama periode 2004 – 2009, ditemukan bahwa, Angka putus sekolah (SD dan SMP) masih tetap tinggi yakni sebesar 4,313,001 murid (2004-2008). Hal ini berarti turun 5,1 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,545,921 murid (2000-2004). Meskipun angka putus sekolah turun, hal ini tetap belum sebanding dengan kenaikan anggaran Depdiknas yang mencapai 1,5 kali lipat dibandingkan dengan Depdiknas periode sebelumnya. Selain itu, jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004) meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008). Kemudian, persentase guru (SD, SMP dan SM) yang tidak layak mengajar hanya turun sebesar 10 persen.

Berdasarkan tiga indikator diatas, hasil upaya pemenuhan hak pendidikan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan untuk Depdiknas. Dari temuan SAHdaR dalam implementasi Program Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan, bahwa pokok masalah sebenarnya bukan ketidakcukupan anggaran, tetapi kapasitas stakeholder pendidikan yang rendah dalam menyusun program yang diperuntukkan bagi mereka sendiri. Terlebih, kemampuan untuk memperjuangkan pengalokasian anggaran dari program yang mereka rumuskan di level pemerintah daerah. Tidak terkecuali di level Dinas Pendidikan, penyerapan anggaran yang rendah disebabkan oleh kapasitas dalam menyusun program dan

¹ Pasal 31 UUD 1945

² <http://banjarmasin.tribunnews.com/index.php/read/artikel/2010/8/3/52385/hubungikami>

sistem yang tidak tegas dijalankan, yaitu apakah Anggaran Daerah dan atau Anggaran Negara disusun dari bawah (*bottom up*) dengan mengakomodasi semua program dari bawah, atau ditetapkan dari atas *top down*. Kembali ke masalah kapasitas stakeholder, hal ini semakin diperkuat pula dengan temuan lain, bahwa guru, pegawai sekolah, orangtua murid, dan masyarakat, tidak pernah mengetahui keberadaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan tidak pernah menyusun/merumuskan. Selama ini, APBS masih menjadi kewenangan mutlak kepala sekolah.

Kenyataan ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi guru, orangtua, dan masyarakat di sekolah masih rendah. Kemudian partisipasi yang rendah berdampak pada kontrol yang rendah terhadap otoritas penuh kepala sekolah, yang berakibat pada penyimpangan penggunaan dana sekolah. Pada level sekolah, penyimpangan dana BOS dimulai dari kontrol guru dan masyarakat yang rendah terhadap APBS. Rendahnya partisipasi stake holder dalam pengelolaan dana pendidikan menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian berdampak langsung pada tingkat korupsi yang tinggi di sektor pendidikan.

Oleh karena itu, partisipasi yang rendah berdampak langsung pada tingginya angka korupsi. Dari pemantauan ICW (2011), penegak hukum telah mengusut 142 kasus korupsi pendidikan dengan total kerugian negara kurang lebih Rp243,3 miliar. Sebagian besar kasus terjadi pada penggelapan dana BOS dan DAK. dari jumlah kasus tersebut, 287 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka Sebagian besar dari mereka berasal dari dinas pendidikan (42 orang) dan jajarannya (67 orang). Selain itu sebanyak 47 kasus berkaitan dengan pengelolaan DAK dengan total kerugian negara mencapai jumlah Rp115,9 miliar. Sementara itu, Jumlah penggelapan pada dana BOS ini sebesar 33 kasus, dengan total kerugian negara sebesar Rp12,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi berkorelasi dengan tingginya korupsi, dan menjadi hambatan serius bagi pemenuhan hak pendidikan.

Dengan demikian, maka partisipasi stakeholder merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha pemenuhan hak pendidikan. Sebab, partisipasi yang tinggi sebanding dengan transparansi dan pencegahan korupsi. Jadi, **penguatan partisipasi stakeholder adalah bagian dari usaha pemenuhan hak pendidikan.**

Oleh karena itu, untuk merumuskan formula yang tepat dalam rangka penguatan partisipasi stakeholder, perlu diketahui akar masalah rendahnya partisipasi. Untuk itu, perlu dilakukan telaah terhadap kondisi lapangan untuk mengetahui intensitas dan jenis partisipasi stake holder di sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Korupsi pada penyelenggaraan pendidikan menghambat upaya pemenuhan hak pendidikan, yang disebabkan oleh rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stake holder dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Stakeholder tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Tingkat partisipasi orangtua di sekolah
2. Jenis partisipasi orangtua di sekolah
3. Alasan orangtua untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi di sekolah
4. Transparansi dan Akuntabilitas

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah orangtua murid berpartisipasi di sekolah ?
2. Apa saja jenis partisipasi orangtua di sekolah ?
3. Apa alasan orangtua berpartisipasi atau tidak berpartisipasi di sekolah ?

E. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tingkat partisipasi orangtua murid di sekolah
2. Mengetahui jenis keterlibatan orangtua di sekolah
3. Mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan

BAGIAN II

METHODOLOGI PENELITIAN SURVEY

A. Pengertian Metode

Metodologi penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara yang sistematis yang dilakukan dalam memecahkan masalah penelitian yang menyangkut apa dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Metodologi penelitian sendiri memiliki makna suatu ilmu yang tersistematis yang menerangkan suatu proses penggunaan metode penelitian tertentu. Jadi, metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian yang dilakukan, karena dengan menetapkan cara yang dipakai dalam penelitian, maka akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang ada. Metode penelitian adalah merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam melakukan penelitian sebab dengan metode yang dipergunakan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian

Arikunto (2006:160) mengemukakan bahwa "metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh pembuat dalam mengumpulkan data penelitiannya, variasi metode dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dokumentasi".

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan atau peristiwa sebagaimana mestinya dengan tujuan menjawab atau memecahkan masalah dan menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada saat sekarang atau masalah-masalah aktual.

Sedangkan dalam penentuan sampel dalam penelitian survey ini menggunakan metode penentuan sampel *random sampling* atau sampel acak sederhana, yang mengacu kepada pendapat Sudjarwo dan Basrowi (2009:272) menyatakan "*sample random sampling* atau sampel acak sederhana yang dapat digunakan dengan menggunakan tabel bilangan random, undian, atau dengan acak sistematis sehingga setiap unit dalam sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih". Menurut Supranto dalam sudjarwo ³Sampling adalah suatu cara pengumpulan data jika hanya elemen-elemen sampel yang akan diteliti. Dan hasilnya merupakan data perkiraan (*estimate*), dan data yang dihasilkan dari sampling bukan merupakan data sebenarnya dari populasi. Jadi dapat diartikan sampling adalah mengambil sampel dari populasi sebagai wakil yang memiliki sifat *representative*.

Banyak pengertian tentang sampel akan tetapi intinya adalah sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi yang dianggap dapat mewakili. Penentuan sampel sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap itu, berapakah jumlah yang dapat mewakili populasi yang tersedia. Dan perlu diingat kualitas suatu penelitian tidak hanya semata-mata dilihat dari besar kecilnya sampel yang diambil dari populasi yang menjadi obyek penelitian. Jadi, berapakah sampel yang tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat kepercayaan yang akan diambil.

Rumus dalam penentuan sampel:

$$s = \frac{\pi^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(n-1) + \pi^2 \cdot P \cdot Q}$$

³ Sudjarwo. Menejemen penelitian social, 2009 hal 266.

Dimana : π^2 = dengan dk= 1 taraf kesalahan 1%, 5%, 10%

$$P = Q = 0,5$$

$$d = 0,05$$

s = jumlah sampel

B. Probability sampel (sampel acak)

Probability sampel adalah metode pengambilan sampel dari populasi dengan sedemikian rupa, sehingga semua sampel yang mungkin diambil dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. (kerlinger dalam sudjarwo 2009:271).

Ada banyak cara dalam menentukan sampel dalam penelitian diantaranya sampel acak sederhana, stratifikasi sampling, multi stage random sampling. Dalam penelitian survey ini akan menggunakan cara yang kedua yakni stratifikasi random sampling yaitu suatu cara dalam menentukan sampel dengan menentukan beberapa tingkatan atau strata. Seperti tingkat pendapatan responden, tingkat pendidikan responden, dan juga melihat latar belakang suku, agama dan kebudayaan. Hal ini bertujuan agar data dari hasil survey yang didapatkan dapat mewakili setiap lapisan keadaan sosial yang ada di kota Medan.

C. Lokasi

1. Tinjauan lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Polonia. Adapun pemilihan tiga kecamatan ini didasarkan atas alasan berikut ;

1. Secara geografis, letak ketiga kecamatan ini (secara berurutan) berada bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan kota medan.
2. Secara fungsional, ketiga kecamatan ini mewakili 3 fungsi wilayah di Kota Medan, yaitu (secara berurutan), kawasan industri, kawasan ekonomi, dan kawasan permukiman.
3. Secara ekonomi, ketiga kecamatan ini mewakili kecamatan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah (penduduk miskin) dan tinggi (penduduk kaya).

2. Batas wilayah lokasi penelitian dan daftar nama kelurahan

✚ Kecamatan Medan Deli dengan batas-batas sebagai berikut :

-**Sebelah Barat** berbatasan dengan kecamatan Percut Sei Tuan (**Kabupaten Deli Serdang**)

-**Sebelah Timur** berbatasan dengan kecamatan Labuhan Deli (**Kabupaten Deli Serdang**)

-**Sebelah Selatan** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Timur**

-**Sebelah Utara** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Marelan Dan Kecamatan Medan Labuhan**

➤ **Dengan bagian kelurahan yang ada di kecamatan Medan Deli**

- Kelurahan/Desa Tanjung Mulia (Kodepos : 20241)
- Kelurahan/Desa Tanjung Mulia Hilir (Kodepos : 20241)
- Kelurahan/Desa Mabar (Kodepos : 20242)

- Kelurahan/Desa Mabar Hilir (Kodepos : 20242)
- Kelurahan/Desa Kota Bangun (Kodepos : 20243)
- Kelurahan/Desa Titi Papan (Kodepos : 20244)

✚ Kecamatan Medan Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Deli**
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Petisah**
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Timur**
- **Sebelah Utara** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Helvetia**

➤ **Dengan bagaiman kelurahan yang ada di kecamatan Medan Barat**

- Kelurahan/Desa Kesawan (Kodepos : 20111)
- Kelurahan/Desa Silalas (Kodepos : 20114)
- Kelurahan/Desa Glugur Kota (Kodepos : 20115)
- Kelurahan/Desa Pulo Brayan Kota (Kodepos : 20116)
- Kelurahan/Desa Karang Berombak (Kodepos : 20117)
- Kelurahan/Desa Sei Agul (Kodepos : 20117)

✚ Kecamatan Medan Polonia terletak di wilayah Selatan Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Baru**
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Maimun**
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Johor**
- **Sebelah Utara** berbatasan dengan **Kecamatan Medan Petisah**

➤ **Dengan bagaiman kelurahan yang ada di kecamatan Medan Polonia.**

- Kelurahan/Desa Anggrung (Kodepos : 20152)
- Kelurahan/Desa Madras Hulu (Kodepos : 20152)
- Kelurahan/Desa Polonia (Kodepos : 20157)
- Kelurahan/Desa Sari Rejo (Kodepos : 20157)
- Kelurahan/Desa Suka Damai (Kodepos : 20157)

D. Populasi dan Sempel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai tempat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Populasi adalah sumber informasi utama yang berarti sekumpulan unsur, unit atau elemen yang menjadi objek penelitian. Sudjarwo dan Basrowi (2009:255) menegaskan “populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian”.

Jadi, ada pun yang menjadi populasi dalam penelitian Survey ini adalah seluruh Kepala rumah tangga pada 3 kecamatan lokasi penelitian yang dapat mewakili seluruh wilayah yang ada di Kota Medan, seperti telah di jelaskan pada penjelasan lokasi yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan lokasi dan kebudayaan yang diharapkan dapat mewaliki setiap lapisan sosial di Kota Medan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi untuk dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam suatu penelitian ilmiah. Sudjarwo (2009:254) menyebutkan “sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi”.

Arikunto (2006:134) mengatakan : “Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat penjelasan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi yang ada yakniKepala Keluarga. Jadi, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 300 (tiga ratus) orang (kepala keluarga/orangtua atau wali murid). Sampel diambil dengan cara acak (*random sampling*), dan secara rata masing-masing 100 sampel disetiap lokasi penelitian yakni kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Polonia.

E. Variable dan defenisi Operasional

1. Variable

Tema dalam penelitian ini adalah Partisipasi orangtua/wali murid di sekolah.

2. Defenisi Operasional

- Partisipasi adalah keterlibatan stake holder dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah/daerah.
- Orangtua adalah orangtua murid yang menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan.
- Murid atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.(UU 20/2003).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

2. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jawaban dari masyarakat/orangtua/wali peserta didik.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Survey lapangan : data dikumpulkan dengan mengambil data berupa pendapat dari sampel melalui pertanyaan terstruktur.
- Wawancara : data dikumpulkan dengan wawancara terhadap responden melalui pertanyaan terstruktur.

4. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- Kuesioner tertutup terbuka

Tabel kisi-kisi instrumen kuisioner

No	Materi	Pertanyaan kuisioner
1	Tentang tingkat partisipasi	Nomor 1 - 5
2	Tentang bentuk partisipasi	Nomor 6 - 17
3	Tentang regulasi, transparansi,	Nomor 18 - 30
4	akuntabilitas	Nomor 31 - 32
5	Tentang harapan kedepan Tentang sikap partisipasi dalam pendidikan	Nomor 33 - 35

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data meliputi.

1. Mentabulasi jawaban responden.
2. Menghitung hasil frekuensi dari setiap alternatif jawaban.
3. Memasukan hasil perhitungan frekuensi dan presentasi dalam tabel.
4. Mengadakan analisis data yang diperoleh serta menarik suatu kesimpulan (hasil penelitian).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami dan Analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Jadi, pengolahan hanya dianalisis menurut isinya dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik sederhana yaitu dengan menghitung presentase jawaban responden dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban responden pada setiap item yang berbeda. dengan menggunakan rumus stasistik sederhana.(Arikunto 2007:265-266).

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase jawaban responden.

f = frekuensi jawaban / jumlah anggota yang menjawab.

N = Jumlah responden.

BAGIAN III

KAJIAN PUSTAKA

Dalam suatu penemuan permasalahan sudah selayaknya didukung oleh data yang akurat demi menambah nilai ilmiah dalam suatu penelitian. Maka tidak terlepas mengacu pada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki korelasi dengan penelitian tersebut. Adapun Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah mengacu kepada tradisi berpikir positivistic yaitu pengetahuan yang berdasarkan data empirik yakni berdasarkan data lapangan yang didapat atau dengan kenyataan.

Maka dibawah ini akan dipaparkan beberapa pengertian yang dapat mendukung dari hasil dan pembahasan dalam penelitian survey “Tingkat Partisipasi Orangtua dalam Penyelenggaraan Pendidikan”.

1. Pengertian pendidikan

Pada dasarnya suatu proses memperoleh pengetahuan adalah bagian dari pendidikan tersebut, secara etimologi pengertian pendidikan dapat diartikan Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap orang/ Individu untuk dapat membuat Individu itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia lebih kritis dalam berfikir. Perlu dipahami bersama Pendidikan bisa diperoleh baik secara formal dan nonformal. Pendidikan formal diperoleh dari kita mengikuti program-program yang sudah dirancang secara terstruktur oleh suatu institusi, departemen atau kementerian suatu Negara. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pengetahuan yang didapat manusia (Peserta didik) dalam kehidupan sehari-hari (berbagai pengalaman) baik yang dia rasakan sendiri atau yang dipelajari dari orang lain (mengamati dan mengikuti).

Menurut Undang-undangan yang menjadi dasar atau Regulasi dalam pendidikan nasional yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Memberikan definisi pendidikan yang pada pokoknya berbunyi:

4Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sedangkan menurut bapak pendidikan nasional kita K.H. Hajar Dewantara “pendidikan merupakan daya upaya untuk mewujudkan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan semestanya”.

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan. Pendidikan adalah suatu upaya sadar dalam pencarian pengetahuan yang bertujuan untuk membekali diri dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang kegunaannya bias untuk diri pribadi mau pun bagi orang lain.

⁴ UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Pengertian sekolah

Pada awalnya kata sekolah tidak saja muncul dalam dunia ini, bila kita telah kata sekolah Secara sosio-histotis sebenarnya berasal dari Bahasa latin yakni ⁵*scola* atau *scolea* yang dipergunakan pada sekitar abad XII yang bermakna “*waktu luang*”. Dahulu para penduduk Yunani menggunakan waktu luang mereka dengan mengunjungi para cendekiawan atau ⁶*sufi*. Lama kelamaan secara *harifa* kata *scola* itu menjadi School yang dalam bahasa Indonesia sekolah. Lama kelamaan dikarenakan kesibukan mencari nafka para orang tua menitipkan anaknya kerumah-rumah cendekiawan dan selanjutnya sekolah menjadi lembaga dan kebanyakan orang tua menyuruh anak-anaknya datang ke lembaga tersebut.

Menurut Para ahli pakar sekolah dapat diartikan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran anak dibawah pengawasan pengajar (guru). Yang memiliki jenjang atau tingkatan dalam setiap umur anak.

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Memberikan definisi sekolah atau satuan pendidikan yang pada pokoknya berbunyi: “⁷*satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, Nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan*”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sekolah adalah suatu lembaga satuan pendidikan yang sengaja dibuat untuk memberikan pendidikan formal maupun non-formal yang berguna bagi bekal anak menjalani hidup yang memiliki jenjang tertentu.

3. Pengertian pemangku kepentingan

Pada perkembangan pengetahuan dewasa ini kata pemangku kepentingan tidak asing lagi kita dengar. Kata pemangku kepentingan atau sering disebut *stakeholder* dapat diartikan sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Atau secara singkat stakeholder dapat didefinisikan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.

Jadi dapat dikata, dalam dunia pendidikan yang menjadi pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah seluruh elemen masyarakat baik yayasan, orangtua siswa maupun guru dan kepala sekolah yang menjadi pengelola utama dalam pembelajaran. Karena pihak-pihak tersebutlah yang memiliki kepentingan dan permasalahan kompleks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

4. Pengertian guru

Dalam dunia pendidikan, istilah guru bukanlah hal yang asing. Menurut pandangan lama, guru adalah sosok manusia yang patut digugu dan ditiru, digugu dalam arti segala ucapannya dapat dipercayai, ditiru berarti segala tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat.

⁵ Malpraktik pendidikan. Hal. 1

⁶ Sufi adalah orang cendekiawan yang memiliki ilmu pengetahuan yang pada masa itu berkeliling untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada masyarakat Yunani

⁷ UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Guru adalah kunci pendidikan artinya, jika guru sukses, maka kemungkinan besar murid-muridnya akan sukses, guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa atau anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-cita besarnya di masa depan.

Menurut Chotimah (2008:14) “guru dalam arti sederhana adalah orang yang memfasilitasi ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik”.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yang pada pokoknya berbunyi :
“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa seorang guru memiliki kemampuan lebih dalam melakukan pekerjaannya. Juga merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus itu berarti untuk proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional maka untuk menjadi seorang guru harus pula memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Hamalik (2008: 118) mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi guru adalah sebagai berikut:

1. Harus memiliki bakat sebagai guru.
2. Harus memiliki keahlian sebagai guru.
3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi.
4. Memiliki mental yang sehat.
5. Berbadan sehat.
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
8. Guru adalah seorang warga negara yang baik.

Oleh karena itu keberadaan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat berdampak terhadap kualitas belajar siswa, maka sudah semestinya peran guru dan kualitas guru harus diperhatikan serta ditingkatkan. Kita harus mengakui bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang harus diperhatikan adalah kualitas guru. Kualitas guru tersebut mencakup kemampuan-kemampuan dalam menerapkan metode-metode pembelajaran. Dengan adanya kemampuan menggunakan metode-metode pembelajaran akan dapat menarik minat belajar siswa untuk mengikuti mata pelajaran yang diajarkan.

Dengan persyaratan diatas diharapkan seorang guru tidak berperan sebagai pemberi ilmu dan pengetahuan kepada siswa/peserta didik akan tetapi dapat menjadi sebagai pembimbing untuk mengembangkan kreatifitas siswa, sebagai sebagai pemimpin atau manajer dan belajar pelatih atau pengajar. Hamalik (2008:124) menjelaskan bahwa:

Sebagai seorang pelatih atau pengajar maka seorang guru akan bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas, mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk belajar keras agar nantinya dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan membantu siswa dalam menghargai nilai belajar dan pengetahuan. Sebagai seorang pembimbing atau konselor guru berkewajiban memberikan bantuan kepada siswa agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri dan juga berperan sebagai sahabat siswa, menjadi teladan dalam pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban pada siswa. Serta sebagai pemimpin atau

manajer belajar guru akan membimbing siswanya dalam belajar untuk mengambil prakarsa dan untuk mengeluarkan ide-ide baik yang dimilikinya.

Dengan adanya peran guru yang ada sekarang ini seperti yang telah dijelaskan di atas maka diharapkan para siswa mampu mengembangkan prestasi diri masing-masing, mengembangkan kreativitas dan mendorong adanya penemuan keilmuan dan teknologi yang inovatif sehingga para siswa mampu bersaing dan menunjukkan prestasi yang dapat mengangkat nama pendidikan nasional dalam masyarakat global.

Menurut Sanjaya (2006: 19) yang dimaksud dengan peran guru adalah : “sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, pembimbing dan evaluator”. Dapat dipahami guru sangat berperan dalam hal meningkatkan mutu pendidikan yang mampu melakukan proses belajar-mengajar disekolah. Melalui interaksi seorang guru/pendidik kepada siswa/peserta didik inilah maka dapat menumbuhkembangkan minat belajar dan bakat yang ada pada anak didiknya. Sehingga proses pembelajaran dapat menciptakan suasana nyaman bagi siswa untuk belajar.

BAGIAN IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam bagian dua dalam laporan penelitian ini untuk memulai dalam mengelola data yang telah didapat, yakni memulai dengan mentabulasi jawaban dari responden yang telah menjawab/mengisi kuisioner yang telah disebar oleh surveyer. Secara logika dalam setiap penelitian ilmiah akan diperlukan sumber data yang relevan, tanpa adanya sumber data maka penelitian tidak dapat dilaksanakan, karena dengan adanya sumber data tersebut akan diperoleh data yang memang diperlukan untuk dapat dipelajari dan dikelola, sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan yang akan dijawab.

Sumber data dalam penelitian survey ini adalah tiga ratus orang tua atau wali siswa yang tersebar di tiga kecamatan yang menjadi lokasi dalam penelitian survey ini diantaranya adalah Kecamatan Medan Deli berjumlah seratus orangtua siswa/wali siswa yang berjumlah seratus orang, Kecamatan Medan Barat berjumlah seratus orangtua siswa/wali siswa yang berjumlah seratus orang, Kecamatan Medan Polonia berjumlah seratus orangtua siswa/wali siswa yang berjumlah seratus orang. Karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka dalam proses pengembalian data yang diperlukan penulis mengambil sebahagian populasi sebagian saja dari jumlah populasi yang kemudian disebut sampel yang menjadi responden dan dapat dikatakan penelitian survey ini merupakan penelitian *random sampling sederhana*.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menyebarkan kuisioner sebanyak tiga ratus kuisioner, kuisioner berisi 35 (tiga puluh lima) pertanyaan. Adapun pilihan jawaban dalam kuisioner yang disebar kepada responden memiliki keragaman, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh yakni kuisioner yang bersifat tertutup terbuka ini, kemudian dijabarkan melalui tabel-tabel frekuensi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik sederhana yaitu dengan menghitung presentase jawaban responden dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban responden pada setiap aitem yang berbeda. dengan menggunakan rumus stasistik sederhana.

Arikunto (2007:265-266)

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Presentasi Pertanyaan yang dijawab
- f = Frekuensi jawaban yang diberikan
- N = Jumlah responden yang menjawab

Pengolahan data setiap pertanyaan yang dijawab oleh responden mempunyai gambaran yang ditabulasi seperti tabel di bawah ini.

B. Tabel Tabulasi Data

1. Tingkat Partisipasi

Tabel I
Apakah bapak/ibu Memiliki Anak Yang Duduk di Bangku Sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya	299	99.6
B	Tidak	1	0.33
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel I di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 297 responden (99,66%) memberikan jawaban ya memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah, 1 responden (0,33%) menyatakan tidak memiliki anak yang duduk di bangku sekolah

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah, adapun 1 responden tidak mempunyai anak yang duduk di bangku sekolah pada saat ini dikarenakan anak tersebut putus sekolah di karenakan kenakalannya maka ia dikeluarkan dari sekolah.

Tabel II
Tentang jenjang pendidikan anak

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Dasar (SD, SMP, MTS)	184	61
B	menengah (SMA, SMK, MA)	84	28
	Dasar dan menengah	32	11
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel II di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 184 responden (61%) yang menyatakan memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar (SD, SMP, MTs), 84 responden (28%) menyatakan memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah menengah (SMA, SMK, MA) dan 32 responden (11%) yang menyatakan memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, memiliki lebih banyak anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD, SMP, MTs)

Tabel III
Persepsi Tentang pernah diundang untuk hadir ke sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya	241	80,3
C	Tidak	59	19,6
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel III di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 241 responden (80%) yang menyatakan pernah di undang kesekolah, 59 responden (20%) menyatakan tidak pernah diundang ke sekolah

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini sering diundang oleh sekolah.

Tabel IV
Tentang menghadiri undangan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, selalu menghadiri	63	26
B	Pernah, tapi tidak setiap undangan	157	65
C	Tidak pernah	21	9
Jumlah		241	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel IV di atas dapat diketahui bahwa dari 241 responden yang pernah diundang kesekolah, 63 responden (26%) yang menyatakan selalu menghadiri undangan dari sekolah, 157 responden (65%) menyatakan tidak setiap bulan menghadiri undangan dari sekolah, dan 21 responden (9%) yang menyatakan tidak pernah menghadiri undangan dari sekolah.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini yang menyatakan hadir seperti terlihat pada table III sebelumnya, ternyata menghadiri undangan tersebut lebih banyak tidak setiap bulan atau jarang untuk menghadiri undangan tersebut.

Tabel V
Tentang undangan dalam hal/acara apa

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Pembagaian nilai	123	51
B	Permasalahan anak	30	12
C	Sosialisasi kebijakan	50	21
D	Lain-lain	38	16
Jumlah		241	100
Menjawab lebih dari satu jawaban		58	65

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel V di atas dapat diketahui bahwa dari 241 yang pernah diundang kesekolah anak responden, 123 responden (51%) menyatakan menghadiri undangan dari sekolah dalam hal pembagian nilai saja, 30 responden (12%) menyatakan menghadiri undangan dari sekolah dalam hal permasalahan anak di sekolah saja, 50 responden (21%) menyatakan menghadiri undangan dari sekolah dalam hal sosialisasi kebijakan, 38 responden (16%) menyatakan menghadiri undangan dari sekolah dalam hal pengumuman dana Bantuan Operasional Sekolah, pemilihan komite sekolah dan sebagainya dan 58 responden (65 %) menjawab lebih dari satu jawaban dari pertanyaan yang diajukan

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, hanya mendapat undangan dalam hal pembagian nilai anak (sering di sebut pembagian raport) setiap akhir tahun ajaran saja.

2. Bentuk Partisipasi

Tabel VI
Tentang pernah memberikan kritik/saran kepada sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, Pernah	73	24
B	Kadang-kadang	29	10
C	Tidak pernah	198	66
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel VI di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 73 responden (24%) menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah, 29 responden (10%) menyatakan kadang-kadang memberikan kritik kepada pihak sekolah, dan 198 responden (66%) menyatakan tidak pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, banyak orang tua/wali siswa tidak pernah memberikan keritik dan saran kepada sekolah tempat anak bersekolah dan ini berarti

kepedulian orang tua terhadap kondisi pendidikan akan dapat dikatakan begitu minim, padahal bila melihat kondisi sekolah dan kemajuan anak dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sangat memprihatinkan.

Tabel VII
Tentang melakukan kritik terhadap/tengang hal

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Proses pembelajaran	34	33
B	Sarana dan prasarana	16	16
C	Biaya pendidikan	35	34
D	Materi pelajaran	8	8
E	Metode pembelajaran	9	9
Jumlah		102	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel VII di atas dapat diketahui bahwa dari 102 responden yang menyatakan pernah dan kadang-kadang member kritik dan sara seerti terlihat pada table VI, 34 responden (33%) yang menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah dalam hal proses pembelajaran, 16 responden (16%) menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah dalam hal sarana dan prasarana sekolah, 35 responden (34%) menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah dalam hal biaya pendidikan anak, 8 responden (8%) menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah dalam hal materi pembelajaran anak di sekolah, 9 responden (9%) menyatakan pernah memberikan kritik kepada pihak sekolah dalam hal metode pembelajaran yang di lakukan oleh guru.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, kebanyak responden yang menjawab pernah memberikan kritik dan saran seperti pada terlihat dari table frekuensi VI diatas dan itupun hanya dalam hal proses pembelajaran anak dan biaya pendidikan anak di sekolah

Tabel VIII
Tentang penyampaian kritik kepada siapa

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Guru	56	55
B	Pegawai	18	18
C	Kepsek/wakasek	28	27
Jumlah		102	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel VIII di atas dapat diketahui bahwa dari 102 responden yang menyatakan pernah memberikan kritik dan saran, 56 responden (55%) yang menyatakan menyampaikan kritik kepada guru, 18 responden (18%) menyatakan menyampaikan kritik

kepada pegawai, 28 responden (27%) menyatakan menyampaikan kritik kepada kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, kebanyakan memberikan kritik dan saran tersebut kepada guru.

Tabel IX
Tentang intensitas pertemuan/rapat di sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, pernah	118	39
B	Kadang-kadang	51	17
C	Tidak pernah	131	44
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel IX di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 118 responden (39%) yang menyatakan pernah mengikuti rapat /pertemuan disekolah, 51 responden (17%) menyatakan kadang-kadang mengikuti rapat /pertemuan disekolah, 131 responden (44%) menyatakan tidak pernah mengikuti rapat /pertemuan disekolah

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, jarang mengikuti rapat/ pertemuan yang diadakan oleh sekolah tempat anak bersekolah.

Tabel X
Tentang pertemuan/rapat tentang apa

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Biaya pendidikan	80	47,33
B	Program sekolah	62	36,68
C	Pemilihan komite	21	12,42
D	Perumusan APBS	6	3,55
Jumlah		169	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel X di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 80 responden (47%) yang menyatakan pernah mengikuti rapat/pertemuan di sekolah dalam hal biaya pendidikan, 62 responden (37%) menyatakan pernah mengikuti rapat/pertemuan di sekolah dalam hal program sekolah, 21 responden (12%) menyatakan pernah mengikuti rapat/pertemuan di sekolah dalam hal pemilihan komite sekolah, 6 responden (7%) menyatakan pernah mengikuti rapat/pertemuan di sekolah dalam hal perumusan APBS.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, lebih banyak mengikuti rapat dalam hal permasalahan biaya pendidikan anak.

Tabel XI
Tentang melakukan sumbangan kepada pihak sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, pernah	126	42
B	Kadang-kadang	21	7
C	Tidak, pernah	153	51
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XI di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 126 responden (42%) yang menyatakan pernah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah, 21 responden (7%) menyatakan terkadang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah, 153 responden (51%) menyatakan tidak pernah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, lebih banyak responden tidak pernah memberikan sumbangan kesekolah tempat anak bersekolah.

Tabel XII
Tentang sumbangan dalam bentuk apa

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Uang	126	85,71
B	Sarana	21	14,28
Jumlah		147	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 126 responden (86%) yang menyatakan pernah menyumbang kesekolah dalam bentuk uang, 21 responden (14%) menyatakan pernah menyumbang kesekolah dalam bentuk sarana.

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, sering memberikan sumbangan dalam bentuk uang.

Tabel XIII
Tentang alasan memberikan sumbangan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
--------	--------------------	-----------	---

A	Keadaan sekolah yang memerlukan	46	31
B	Ada rejeki (kemauan sendiri)	27	18
C	Permintaan sekolah	60	41
D	Lain-lain	14	10
Jumlah		147	100
menjawab lebih dari satu pilihan		87	59

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XIII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 46 responden (31%) menyatakan memberikan sumbangan kepihak sekolah di karenakan keadaan sekolah yang membutuhkan, 27 responden (18%) menyatakan memberikan sumbangan kepihak sekolah dikarenakan ada rejeki (atas kemauan sendiri), 60 responden (41%) menyatakan memberikan sumbangan kepihak sekolah di karenakan permintaan pihak sekolah, 14 responden (10%) menyatakan memberikan sumbangan kepihak sekolah di karenakan lain-lain

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini yang menyatakan pernah memberikan sumbangan dikarenakan permintaan dari sekolah dan kebanyakan dari responden memberikan sumbangan tersebut memiliki beberapa alasan diantaranya melihat keadaan sekolah anak yang memprihatinkan dan oleh pihak sekolah yang meminta bantuan tersebut.

Tabel XIV
Tentang penyampaian/penyerahan sumbangan kepada siapa

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Guru	90	61
B	Pegawai	18	12
C	Pemilik yayasan	13	9
D	Kepsek/wakasek	26	18
Jumlah		147	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XIV di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 90 responden (61%) yang menyatakan apabila memberi sumbangan di sampaikan kepada guru, 18 responden (12%) menyatakan apabila memberi sumbangan di sampaikan kepada pegawai, 13 responden (9%) menyatakan apabila memberi sumbangan di sampaikan kepada pemilik yayasan, 26 responden (18%) menyatakan apabila memberi sumbangan di sampaikan kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini yang menyatakan pernah memberikan sumbangan menyerahkan sumbangan tersebut lebih banyak melalui guru dan langsung ke kepala sekolah.

Tabel XV
Tentang pernah diundang dalam menentukan program
dalam jangka setahun kedepan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , pernah	79	26
B	Tidak pernah	221	74
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XV di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 79 responden (26%) yang menyatakan pernah diundang pihak sekolah dalam menentukan program setahun kedepan, 221 responden (74%) menyatakan tidak pernah diundang pihak sekolah dalam menentukan program setahun kedepan.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini tidak pernah mendapat undangan dari sekolah dalam menentukan program setahun kedepan.

Tabel XVI
Tentang menghadiri undangan penentuan program sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , menghadirinya	93	31
B	Kadang-kadang kalau ada waktu	28	9,33
C	Tergantung program tentang apa	26	8,66
D	Tidak menghadirinya	35	11,66
Yang tidak menjawab		118	39,33
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XVI di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 93 responden (31%) yang menyatakan akan menghadiri undangan apabila diundang oleh pihak sekolah dalam menentukan program sekolah, 28 responden (9%) menyatakan hanya kadang-kadang saja menghadiri undangan apabila diundang oleh pihak sekolah dalam menentukan program sekolah, 26 responden (9%) menyatakan tergantung pada program yang akan dibahas lalu akan menghadiri undangan apabila diundang oleh pihak sekolah, 35 responden (12%) yang menyatakan tidak akan menghadiri undangan apabila diundang oleh pihak sekolah dalam menentukan program sekolah dalam menentukan program sekolah, 118responden (12%) yang tidak memberikan jawaban bila diundang diundang oleh pihak sekolah dalam menentukan program sekolah dalam menentukan program sekolah.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini dan yang memberikan jawaban akan menghadiri

undangan yang diberikan sekolah dalam menentukan program. Jadi terlihat jelas bahwasanya masyarakat atau orangtua/wali murid menginginkan adanya undangan dari sekolah dalam menentukan program di sekolah anak.

Tabel XVII
Tentang alasan tidak menghadiri undangan dalam penentuan program sekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Kesibukan pekerjaan	75	25
B	Tidak ada teman untuk pergi menghadiri	7	2,33
C	Tidak mengetahui maksud dari undangan	10	3,33
D	Merasa kurang penting untuk mengharinya	4	1,33
Yang tidak memberikan jawaban		204	68
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XVII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 75 responden (25%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dari sekolah dikarenakan kesibukan pekerjaan, 7 responden (2,33%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dari sekolah dikarenakan tidak ada teman untuk pergi menghadiri undangan tersebut, 10 responden (3,33%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dari sekolah dikarenakan tidak tahu maksud dari undangan tersebut, 4 responden (1,33%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dari sekolah dikarenakan merasa kurang penting untuk mengahadirinya. 204 responden (68%) tidak memberikan jawaban bila ditanya alasan tidak akan menghadiri apabila ada undangan dari sekolah anak.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwa banyak responden yang tidak mau menjawab apabila ditanya alasan tidak menghadiri undangan dari pihak sekolah anak. Adapun yang menjawab tidak dapat menghadiri dari sekolah tersebut dikarenakan kesibukan pekerjaan.

3. Regulasi, transparansi dan akuntabilitas

Tabel XVIII
Tentang pengetahuan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, mengetahui	133	44,33
B	Pernah mendengar	72	24
C	Kurang mengetahui	54	18
D	Tidak mengetahui	36	12
Yang tidak memberikan jawaban		5	1,66
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XVIII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 133 responden (44%) menyatakan mengetahui aturan dalam penyelenggaraan pendidikan, 72 responden (24%) menyatakan hanya pernah mendengar aturan dalam penyelenggaraan pendidikan, 54 responden (18%) menyatakan kurang mengetahui aturan dalam penyelenggaraan pendidikan, 36 responden (12%) menyatakan kurang mengetahui aturan dalam penyelenggaraan pendidikan dan 5 responden (2%) tidak member jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini memiliki pengetahuan tentang aturan dalam penyelenggaraan pendidikan, walaupun banyak responden yang menyatakan pernah mendengar.

Tabel XIX
Tentang peraturan yang di ketahui oleh responden

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Tentang pendidikan nasional	51	17
B	Tentang guru	12	4
C	Tentang pembiayaan sekolah (BOS)	184	61
D	Lain-lain	12	4
Yang tidak menjawab dan tidak mengetahui		41	14
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XIX di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 51 responden (17%) menyatakan hanya mengetahui aturan tentang pendidikan nasional, 12 responden (4%) menyatakan hanya mengetahui aturan tentang guru, 184 responden (61%) menyatakan hanya mengetahui aturan tentang pembiayaan sekolah (BOS), 12 responden (4%) menyatakan hanya mengetahui aturan tentang lain-lain dan 41 responden (14%) tidak memberikan pertanyaan.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini,kebanyak renponden mengetahui pernah mendengar atau dapat dikatakan hanya mengetahui sedikit saja aturan tentang BOS tersebut.

Tabel XX
Persepsi Tentang apakah aturan tersebut sudah terimplementasi dengan baik

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya, sudah	99	33
B	Kurang	128	42
C	Tidak	27	9
D	Lain-lain	5	2
Yang tidak member jawaban		41	14
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XX di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 99 responden (33%) menyatakan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah terimplementasi dengan baik, 128 responden (42%) menyatakan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan kurang terimplementasi dengan baik, 27 responden (9%) menyatakan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terimplementasi dengan baik, 5 responden (2%) menyatakan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan belum merata dan belum terimplementasi dengan baik dan 41 responden (14%) tidak menjawab pertanyaan.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini merasakan bahwasan aturan yang mereka ketahui tentang penyelenggaraan pendidikan belum terimplementasi secara baik.

Tabel XXI
Persepsi Tentang apakah aturan tersebut sudah dapat menjamin tujuan pendidikan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , menjamin	99	33
B	Kurang menjamin	105	35
C	Tidak menjamin	49	16
D	Lain-lain	6	2
Tidak memberikan jawaban		41	14
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXI di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 99 responden (33%) yang menyatakan aturan yang ada sekarang ini tentang penyelenggaraan pendidikan sudah menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, 105 responden (35%) menyatakan aturan yang ada sekarang ini tentang penyelenggaraan pendidikan kurang menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, 49 responden (16%) menyatakan aturan yang ada sekarang ini tentang penyelenggaraan pendidikan tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, 6 responden (2%) yang menyatakan aturan yang ada sekarang ini tentang penyelenggaraan pendidikan sebenarnya secara prinsipnya sudah menjamin akan tetapi pengemplementasiannya menghambat dalam pencapaian dari tujuan pendidikan nasional dan 41 responden tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, terlihat jelas bahwasanya aturan yang mereka ketahui tersebut belum menjamin untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan bersama.

Tabel XXII
Persepsi Tentang perlukah aturan khusus tentang pendidikan di Kota Medan

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , perlu	265	88,33
B	Kurang perlu	22	7,33
C	Tidak perlu	13	4,33
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 265 .responden (88,33%) yang menyatakan memerlukan aturan yang khusus tentang pendidikan di Kota Medan, 22 responden (7,33%) menyatakan kurang memerlukan aturan yang khusus tentang pendidikan di Kota Medan, 13 responden (4,33%) menyatakan tidak memerlukan aturan yang khusus tentang pendidikan di Kota Medan.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini menyatakan bahwasanya pada saat ini kota medan sangat memerlukan atau membutuhkan aturan khusus untuk mengatasi dan mengupayakan pendidikan yang lebih baik.

Tabel XXIII
Tentang pernahkah diundang dalam perumusan APBS di sekolah anak

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , pernah	30	10
B	Tidak pernah	250	83
Yang tidak memberikan jawaban		20	7
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXIII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 30 responden (10%) yang menyatakan pernah diundang sekolah dalam perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Sokelah (APBS), 250 responden (83%) menyatakan menyatakan tidak pernah diundang sekolah dalam perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Sokelah (APBS) dan 20 reponden (7%) tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasanya pihak sekolah tidak pernah mengundang orangtua/wali murid dalam menentukan dan merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) atau dengan kata lain sekolah tidak pernah mencoba mengajak orang tua dalam menentukan program sekolah untuk setahun kedepan.

Tabel XXIV
Tentang tanggapan undangan perumusan APBS di Sekolah tempat anak bersekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , menghadirinya	192	64
B	Tidak menghadirinya	51	17
Yang tidak memberikan jawaban		57	19
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXIV di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 192 responden (64 %) yang menyatakan jika diundang untuk merumuskan APBS akan menghadiri undangan tersebut, 51 responden (17%) menyatakan jika diundang untuk merumuskan APBS akan tidak akan menghadiri undangan tersebut dan 57 responden (19%) tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini. Sebenarnya apabila sekolah mengundang orangtua/wali murid untuk merumuskan APBS mereka akan menghadirinya, akan tetapi kembailagi sekolah masih saja kurang terbuka terhadapap penyusunan APBS tersebut.

Tabel XXV
Tentang alasan menghadiri undangan perumusan APBS

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Kurang percaya kepada pihak sekolah dalam menentukan program	42	14
B	Agar memahami proses perumusan APBS tersebut	141	47
C	Karena tidak ada kesibukan	5	2
D	Agar mengetahui program yang akan di rencanakan kedepan	59	20
E	Lain-lain	7	2
Yang tidak memberikan jawaban		46	15
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXV di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 42 responden (14%) yang menyatakan akan menghadiri undangan dalam perumusan APBS dengan alasan kurang percaya kepada pihak sekolah dalam menentukan program, 141 responden (47%) menyatakan akan menghadiri undangan dalam perumusan APBS dengan alasan agar memahami proses perumusan APBS tersebut, 5 responden (2%) menyatakan akan menghadiri undangan dalam perumusan APBS dikarenakan tidak ada kesibukan lain, 59 responden (20%) menyatakan akan menghadiri undangan dalam perumusan APBS dengan alasan agar mengetahui program yang akan direncanakan, 7 responden (2%) menyatakan akan menghadiri undangan dalam perumusan APBS dengan alasan ingin memberikan saran untuk dilaksanakan kedepan dan 46 responden (15%) tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasannya ingin memahami proses penyusunan APBS dan agar memahami dan mengetahui program kedepan yang ada di sekolah anak bersekolah.

Tabel XXVI
Tentang alasan tidak menghadiri undangan perumusan APBS tersebut

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Percaya pada sekolah untuk menentukan program	41	14
B	Merasa kurang penting untuk hal tersebut	16	5
C	Sibuk dengan pekerjaan	79	26
D	Lain-lain	12	4
Yang tidak member jawaban		152	51
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXVI di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 41 responden (14%) yang menyatakan jika tidak menghadiri undangan dalam perumusan APBS dikarenakan percaya pada sekolah untuk menentukan program, 16 responden (5%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dalam perumusan APBS dikarenakan merasa kurang penting untuk menghadiri undangan tersebut, 79 responden (26%) menyatakan jika tidak menghadiri undangan dalam perumusan APBS dikarenakan sibuk dengan pekerjaan, 12 responden (4%) menyatakan lain-lain dan 152 responden (51%) tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasanya alasan terbesar orangtua/wali murid tidak dapat menghadiri undangan dalam perumusan APBS tersebut dikarenakan kesibukan pekerjaan.

Tabel XXVII
Tentang pengetahuan program sekolah tempat anak bersekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , mengetahui	45	15
B	Kurang mengetahui	93	31
C	Tidak mengetahui	139	46
Tidak memberikan jawaban		23	8
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXVII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 45 responden (15%) yang menyatakan mengetahui program sekolah tempat akan bersekolah, 93 responden (31%) menyatakan kurang mengetahui program sekolah tempat akan bersekolah, 139 responden (46%) menyatakan tidak mengetahui program sekolah tempat akan bersekolah dan 23 responden (8%) tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, jelas bahwasannya para orangtua/wali murid tidak mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh sekolah tempat anaknya bersekolah.

Tabel XXVIII
Persepsi Tentang pembublikasian program dan pendapatan sekolah tempat anak bersekolah

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , ada	66	22
B	Kurang tahu	145	48
C	Tidak ada	89	30
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXVIII di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 66 responden (22%) menyatakan ada usahan pihak sekolah dalam mempublikasikan program dan pendapatan sekolah kepada publik, 145 responden (48%) menyatakan kurang tahu tentang usahan pihak sekolah dalam mempublikasikan program dan pendapatan sekolah kepada publik, 89 responden (30%) menyatakan tidakada usahan pihak sekolah dalam mempublikasikan program dan pendapatan sekolah kepada publik.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasanya orangtua/wali murid kurang mengetahui adanya usahanya sekolah untuk mempublikasikan program sekolah tempat anak bersekolah dan sebagian besar mengetahui bahwa di sekolah tempat anak bersekolah tidak ada usaha sekolah dalam mempublikasikan program sekolah tersebut.

Tabel XXIX
Tentang papan informasi kegiatan dan program di Sekolah anak

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , ada dan mengetahui	79	26
B	Kurang mengetahui	147	49
C	Tidak ada	41	14
D	Lain-lain	3	1
Yang tidak memberikan jawaban		30	10
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXIX di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 79 responden (26%) yang menyatakan ada dan mengetahui adanya papan Informasi kegiatan dan program di sekolah anak bersekolah, 147 responden (49%) menyatakan kurang mengetahui

adanya papan Informasi kegiatan dan program di sekolah anak bersekolah, 41 responden (14%) menyatakan tidak adanya papan Informasi kegiatan dan program di sekolah anak bersekolah pemungutan untuk hari tua 3 responden (1%) menyatakan kurang mengetahui lain-lain papan Informasi kegiatan dan program di sekolah anak bersekolah dan 30 responden (10%) yang tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasannya orangtua/wali murid tidak mengetahui adanya papan Informasi tempat mengumumkan program di sekolah tempat anak bersekolah.

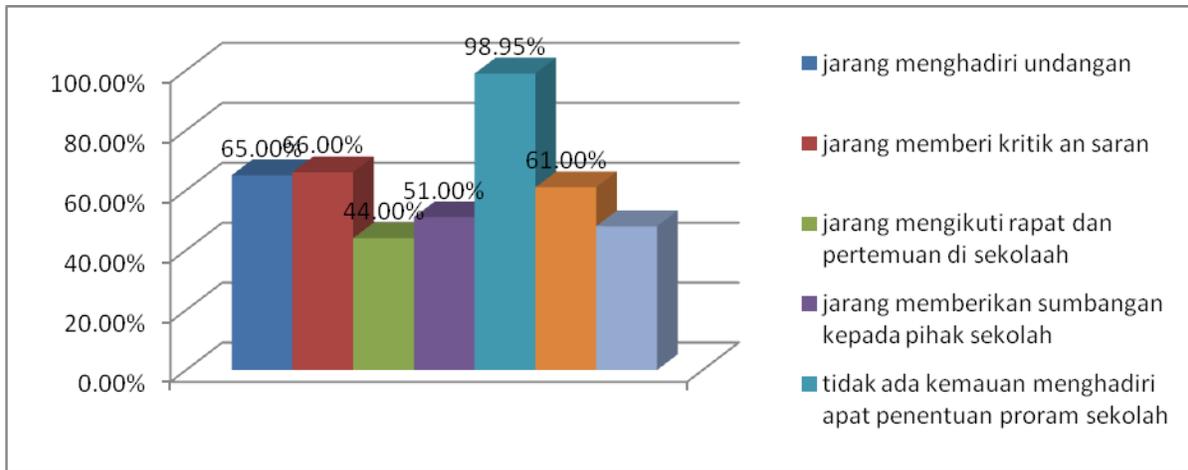
Tabel XXX
Tentang sarana untuk memperoleh informasi di Sekolah anak

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
A	Ya , ada	89	30
B	Kurang tahu	125	42
C	Tidak ada	55	18
Yang tidak memberikan jawaban		31	10
Jumlah		300	100

Berdasarkan frekuensi jawaban tabel XXX di atas dapat diketahui bahwa dari 300 responden, 89 responden (30%) yang menyatakan ada sarana untuk memperoleh informasi di sekolah anak bersekolah, 125 responden (42%) menyatakan kurang mengetahui ada atau tidak sarana untuk memperoleh informasi di sekolah anak bersekolah, 55 responden (18%) menyatakan tidak ada sarana untuk memperoleh informasi di sekolah anak bersekolah pemungutan untuk hari tua dan 31 responden (10%) yang tidak memberikan jawaban.

Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang menjadi sumber data pada penelitian survey ini, bahwasannya kebanyakan dari orangtua/wali murid tidak mengetahui tentang sarana informasi yang ada di sekolah dan adapun sebagian besar orang tua menyatakan tidak adanya sarana untuk memperoleh informasi di sekolah tempat anak bersekolah.

A. KESIMPULAN



Gambar 8.
Diagram Partisipasi

Dari gambar diagram partisipasi diatas dapat diketahui:

1. Partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di **golongan rendah**. Hal tersebut dapat terlihat jelas dari orangtua jarang memenuhi undangan dan rapat penentuan program sekolah, sehingga menyebabkan para orang tua tidak mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, hal tersebut diperparah juga dengan orangtua siswa kurang mengetahui peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku dalam mendukung berjalanya sistem pendidikan nasional. Pada hal sebenarnya sudah jelas aturan yang mengajurkan bahwasanya orang tua terlibat atau berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai mana yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2007 Tentang Standard Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang pada bagaian lampiran poin ke sepuluh menegaskan bahwasanya dalam penyelolaan di perlukan keterlibatan masyarakat.
2. Orangtua siswa tidak aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat dilihat dari jarang nya orangtua siswa memberikan kritik dan saran yang bertujuan untuk memajukan system/situasi pendidikan sekolah yang sedang berlangsung, Sehingga secara umum sekolah yang ada dilokasi penelitian ini, menentukan program sekolah secara sepihak, hal ini dapat terlihat dari jarang atau hampir tidak pernah pihak sekolah mengundang orang tua dalam rapat penentuan program dan perumusan APBS. Hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi dalam mempublikasikan program sekolah yang dapat terlihat dari tidak adanya sarana dan prasarana publikasi bagi masyarakat untuk mengakses program dan anggaran yang berlangsung/ada di sekolah tersebut.
3. faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelnggaran pendidikan adalah:
 - a. Tidak adanya sarana dalam berpartisipasi yang disiapkan sekolah guna meningkatkan daya pertisipasi masyarakat.

- b. Terjadi kesalah berfikir di masyarakat itu sendiri bahwasanya pendidikan itu adalah hanya mencakup proses dari belajar mengajar tersebut(hanya itu saja), dan apabila ikut ambil bagaian dalam dunia pendidikan hanya sebatas disaat anaknya mendapat masalah maupun prestasi dari sekolah atau satuan pendidikan tersebut.
- c. Ketidak terbukanya sekolah atau tertutup dan tidak mau membuka diri kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi.

Jadi, dapat disimpulkan secara tegas perilaku yang tidak baik dalam suasana seperti yang tergambar di atas. Menyebabkan terjadinya penyalagunaan wewenang dan dana bantuan (korupsi dana pendidikan) dan perilaku “merendahkan” mutu pendidikan yang terjadi dewasa ini, seakan-akan suasana ini suatu hal yang sengaja dibuat/dibiarkan oleh orang-orang tertentu di kalangan pengelola pendidikan (kepala sekolah, yayasan) dengan memanfaatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Dimana keterlibatan orangtua atau masyarakat yang dianjurkan oleh aturan-aturan tentang pendidikan yang pada dasarnya bermanfaat untuk mengontrol dan memberikan masukan pada pendidikan. Mala sengaja dilemahkan oleh individu-individu tertentu demi kenikmatan pribadi dan kelompok tertentu. Padahal seharusnya apabila melihat kondisi rendahnya partisipasi orangtua/masyarakat terhadap keadaan sekolah, maka segera memikirkan untuk memiliki suatu formulasi yang dapat mendorong partisipasi orangtua tersebut.

Dilain pihak pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap suasana pengelolaan pendidikan yang *koruptif* ini. Mengapa tidak, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan nasional sepertinya membiarkan hal tersebut, seakan-akan tidak tahu yang berarti tidakmua tahu. Apabila hal tersebut dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada mutu pendidikan yang berjalan ditempat bahkan akan berakibat berjalan kebelakang. Dengan kata lain pendidikan yang ada adalah suatu suasana mencari “nafka” bukan untuk mendidik yang benar-benar mendidik. Sebab rendahnya partisipasi adalah bentuk “kebobrokan” dari pemerintah itu sendiri. Jadi, adalah tugas negara untuk meningkatkannya dan bukannya malah menyalakan masyarakat tersebut dengan berdalaih bahwasanya itu adalah kemauan dari masyarakat dan susah untuk dirubah. Padahal jelas negara memiliki kewenangan untuk “memaksa”, jadi kalau memang sulit ya harus dipaksa dan jangan hanya menggunakan kewenangan yang “memaksa” tadi pada/untuk kepentingan politis saja.

Untuk itu pemerintah atau Mendikbud pada khususnya, harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut dan menegakan peraturan yang ada, bukan mala melanggar peraturan tersebut dan ikut menikmati suasana tersebut. Pertukaran kata-kata seperti Mendikbud lalu berubah menjadi mendiknas dan berubah lagi menjadi mendikbu sebenarnya bukan menjadi hal yang substansi dalam memajukan pendidikan nasional. Sebab apapun sebutannya ada namanya. Ya tetap saja yang pada intinya adalah pendidikan dalam artian memajukan dan memanusiakan bukan memiskinkan dan membodohi. Maka yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah pendidikan itu sendiri bukan hanya nama. Sehingga perlu ditanamkan dalam pola pikir kita untuk meningkatkan mutu pendidikan langkah yang utama dan terutama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam artian **partisipasi masyarakat/orangtua tinggi = kontrol kuat = korupsi pendidikan rendah= mutu pendidikan meningkat**. Sebab yang tahu kebutuhan dalam kemajuan pendidikan adalah masyarakat dan tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Dari hasil pembaharuan dan kesimpulan yang ditarik, guna mengatasi permasalahan yang telah terjadi atau meminimalkannya dan memberikan sedikit peningkatan atau mendorong partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan, ada baiknya yang harus dilakukan yakni :

1. Pemerintah harus menyediakan aparaturnegara yang bertugas memberikan penyuluhan dalam pendidikan bagi orangtua. Yang bertugas menjelaskan kepada orangtua bahwasanya keterlibatan orangtua dalam penyelenggara pendidikan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan orangtua tersebut dan apabila diperlukan menggunakan paksaan. Sebagaimana sifat suatu negara menurut Max Weber “ bahwasanya negara memiliki wewenang dalam memaksa warga negaranya guna menciptakan ketertiban. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang yang sedang berlaku maka setelah undang-undang tersebut diundangkan/disahkan maka secara otomatis setiap warganegara harus dan wajib mengikuti dan mematuhi.
2. Bagi pihak sekolah, sekolah harus bersifat persuasif dalam menghadapi kekritisannya orangtua siswa dalam menanyakan keadaan dan program sekolah yang sedang berlangsung. Untuk itu, maka sekolah harus menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh orangtua siswa seperti papan informasi yang jelas, orang yang bertugas memberikan informasi yang memiliki kriteria yang baik, memberikan informasi secara berkala kepada orangtua siswa tentang program, kebijakan yang mau diambil/diterapkan maupun tentang pendapatan/pemasukan dan atau keadaan keuangan sekolah. Hal ini berguna agar tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang berlebihan dan menghilangkan rasa curiga masyarakat terhadap sistem administrasi sekolah yang buruk pada saat ini. Satu hal lagi dalam menyikapinya rendahnya partisipasi orangtua terhadap pendidikan sekolah harus memiliki jiwa yang besar terus-menerus mengajak orangtua siswa untuk aktif, bahkan memberikan laporan kegiatan atau program secara tertulis kepada orangtua siswa tersebut.
3. Bagi orangtua/masyarakat, sudah saatnya memiliki kesadaran dan jiwa yang besar dalam menyikapi permasalahan dalam dunia pendidikan. Untuk itu haruslah rela memberikan/meluangkan waktu untuk mengkritik dan memberikan saran kepada sekolah guna membangun pendidikan anak yang berkualitas. Prilaku yang kurang baik seperti hanya mau datang kesekolah apabila anak mendapat masalah dan prestasi haruslah segera dihilangkan, sebab pendidikan anak tidak sesimpel yang kita bayangkan, yakni anak pergi sekolah lalu pulang dan begitu seterusnya, permasalahan anak disekolah juga memerlukan peran serta orangtua baik secara langsung datang kesekolah maupun memberikan arahan kepada anak pada saat dirumah. Dan memberi kritik yang bersifat membangun kepada pihak sekolah. Sebab adalah hak kita orangtua untuk mengeluarkan pendapat kita dan hal itu di lindungi oleh undang-undang.
4. Harus adanya keterlibatan dinas, aparaturnegera desa(lurah, kades dan dinas pendidikan perkecamatan.

C. REKOMENDASI

dalam pelaksanaan survey tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Disadari banyak terdapat kekurangan dalam memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut dan mendalam guna menyempurnakan hasil yang lebih memuaskan. Adapun hal yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik yang diantaranya meneliti/mensurvey tentang :

1. Sarana dan prasarana yang ada disekolah dalam mempublikasikan APBS sekolah
2. Adanya kajian tentang aturan yang berlaku disekolah-sekolah apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.
3. Mendorong pemerintah untuk secara terus-menerus menghimbau agar masyarakat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan cara (mengadakan diskusi yang bersifat terus-menerus dan memiliki standard capaian)
4. Apakah kebijakan pendidikan yang ada sudah dapat menjamin untuk mendorong peningkatan partisipasi yang rendah sesuai hasil dari penelitian ini.

Questionnaire

Survey Tingkat Partisipasi Orangtua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Hari/Tanggal :

Kecamatan :

Nama responden :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Jumlah Anak :

Nomor Kontak :

1. Apakah Bapak/Ibu mempunyai anak yang sedang duduk di bangku sekolah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

“jika tidak langsung

Pertanyaan tingkat partisipasi	Keterangan
<ol style="list-style-type: none">2. Jika ya, duduk dijenjang pendidikan apa?<ol style="list-style-type: none">a. Dasar (SD, SMP, MTs)b. Menengah (SMA, SMK, MA)3. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang untuk hadir di sekolah ?<ol style="list-style-type: none">a. Yab. Tidak4. Jika pernah, apakah Bapak/Ibu menghadiri undangan tersebut ?<ol style="list-style-type: none">a. Ya, Pernah dan selalub. Pernah atau tidak setiap undanganc. Tidak pernah5. Jika Pernah, dalam hal/acara apa ?<ol style="list-style-type: none">a. Pembagian nilaib. Permasalahan Anak di sekolahc. Sosialisasi kebijakand. Lain-lain	

Catatan :

Pertanyaan tentang bentuk partisipasi

6. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan kritik/saran kepada sekolah ?
a. Ya, pernah b. terkadang c. Tidak pernah

7. Jika pernah, dalam hal apa?
a. Proses pembelajaran disekolah
b. Sarana dan prasarana sekolah
c. Biaya pendidikan sekolah
d. Materi pelajaran anak
e. Cara/Metode guru mengajar

8. Jika pernah, kepada siapa disampaikan ?
a. Guru b. Pegawai c. Kepala Sekolah/Pembantu Kasek

9. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti rapat/pertemuan di sekolah
a. Ya, pernah b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

10. Jika pernah, rapat/pertemuan tentang apa?
a. Biaya pendidikan c. pemilihan komite sekolah
b. program sekolah d. perumusan APBS

11. Apakah Bapak/Ibu pernah menyumbang (dana/peralatan) kepada sekolah ?
a. Ya, pernah b. kadang-kadang c. Tidak pernah

12. Jika pernah, dalam hal/bentuk apa?

--	--

Catatan:

--

Pertanyaan tentang regulasi, transparansi, akuntabilitas	Keterangan
--	------------

18. Apakah bapak/ibu mengetahui aturan dalam penyelenggaraan pendidikan ?

- a. Ya, mengetahui
- b. Pernah mendengar
- c. Kurang mengetahui
- d. tidak mengetahui

19. Jika mengetahui, aturan-aturan tentang apakah itu?

- a. tentang pendidikan nasional
- b. tentang guru
- c. tentang pembiayaan sekolah (BOS)
- d. lain-lain (perlu di catat)

20. Menurut bapak/ibu apakah aturan yang bapak/ibu ketahui tersebut sudah terimplementasi/berjalan dengan baik?

- a. Ya, sudah
- b. Kurang
- c. tidak
- d. lain-lain (perlu dicatat)

21. Menurut bapak/apakah aturan tersebut sudah dapat menjamin atau mendukung tercapainya tujuan dari pendidikan di kota medan?

- a. Ya, menjamin
- b. Kurang menjamin
- c. Tidak menjamin
- d. Lain-lain (perlu dicatat)

22. apakah menurut bapak ibu perlu aturan khusus untuk pendidikan di kota medan?

- a. Ya, perlu
- b. kurang perlu
- c. tidak perlu

23. Apakah bapak ibu pernah diundang dalam perumusan **anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS)**?

- a. Ya pernah
- b. tidak pernah

24. Jika bapak/ibu diundang untuk merumuskan (**APBS**) tersebut apakah

bapak /ibu akan menghadirinya?

- a. Ya, akan menghadirinya b. tidak menghadirinya

25. Jika menghadirinya apa alasan dan untuk apa bapak/ibu menghadirinya?

- a. Kurang percaya kepada pihak sekolah dalam menentukan program
b. Agar memahami proses perumusan APBS tersebut
c. Kerena tidak ada kesibukan lain
d. Agar mengetahui progam yang akan direncanakan kedepan
e. Lain-lain (perlu dicatat)

26. Jika tidak menghadirinya apa alasan bapak/ibu?

- a. Percaya pada sekolah untuk mentukan program
b. Kurang penting untuk mengetahui hal tersebut
c. Sibuk dengan pekerjaan
d. Lain-lain (perlu dicatat)

27. Apakah bapak /ibu mengetahui program sekolah anak bapak/ibu dalam setahun kedepan?

- a. Mengetahui b. kurang mengetahui c. tidak mengetahui

28. Menurut bapak/ ibu adakah usaha pihak sekolah untuk mempublikasikan program dan pendapatan sekolah?

- a. Ya, ada b. kurang tahu c. tidak ada

29. Apakah bapak/ibu mengetahui disekolah anak bapak/ibu ada papan informasi untuk segala kegiatan dan program yang pihak sekolah lakukan?

- a. Ya, ada dan mengetahui
b. Kurang mengetahui
c. Tidak ada
d. Lain-lain.....

<p>30. Apakah disekolah bapak ibu ada sarana untuk memperoleh informasi program sekolah (orang)?</p> <p>a. Ya, ada b. kurang tahu c. tidak ada</p>	
<p>Catatan:</p>	

Pertanyaan tentang harapan kedepan	keterangan
<p>31. Seandainya kedepan pihak sekolah mengundang dalam hal kebijakan pendidikan sekolah apakah bapak/ibu akan menghadirinya?</p> <p>a. Ya, akan hadir</p> <p>b. Tergantung terhadap kebijakan apa</p> <p>c. tidak akan menghadirinya</p> <p>d. lain-lain</p> <p>32. Menurut bapak/ibu kedepan perlukah masyarakat dilibatkan dalam setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pihak sekolah?</p> <p>a. Ya sangat perlu</p> <p>b. Perlu</p> <p>c. Kurang perlu</p> <p>d. Tidak perlu</p>	

Catatan:

Pertanya tentang sikap partisipasi dalam pendidikan	Keterangan
<p>33. Menurut bapak/ibu apakah yang seharusnya yang di lakukan pihak sekolah agar terjalin hubungan yang baik orang tua/wali siswa?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya publikasi secara terus-menerus tentang program sekolah kepada orang tua siswa atau walib. Adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa atau walic. Adanya keterbukaan antara pihak sekolah dan orang tua atau walid. Lain-lain (perlu dicatat) <p>34. Menurut bapak/ibu apakah hambatan orang tua / wali siswa kurang/tidak berpartisipasi terhadap pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesibukan pekerjaanb. Kurang paham tentang pendidikanc. Member kepercayaan kepada pihak sekolahd. Lain-lain(perlu dicatat) <p>35. Menurut bapak/ibu hal apa yang perlu dilakukan agar pendidikan di lingkungan bapak/ibu dapat berjalan dengan baik?</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya aturan yang tegas tentang pendidikan b. Adanya keterlibatan secara langsung masyarakat terhadap kebijakan dan program sekolah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat c. Lain-lain (perlu dicatat) 	
<p>Catatan:</p>	

Catatan Surveyor terhadap responden

Antusiasme :

Pengetahuan/cara menjawab :

Agama :

Suku/Etnis :

Tingkat pendidikan :

- | | | |
|---------------------|----------|----------------|
| 1. SD | a. tamat | b. tidak tamat |
| 2. SMP/MTSn | a. tamat | b. tidak tamat |
| 3. SMA/SMK/MA | a. tamat | b. tidak tamat |
| 4. Perguruan Tinggi | a. tamat | b. tidak tamat |